



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : Kementerian Perhubungan

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FITRAJAYA SIWU
2. Jabatan : KEPALA KANTOR
3. NHK : 141823

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.564.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 246 m2/144 m2 di KAB / KOTA BANGGAI, HASIL SENDIRI Rp. 565.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 367.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 317 m2/63 m2 di KAB / KOTA BANGGAI, HASIL SENDIRI Rp. 207.500.000
4. Tanah Seluas 1.680 m2 di KAB / KOTA BANGGAI, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000
5. Tanah Seluas 440 m2 di KAB / KOTA BANGGAI, HASIL SENDIRI Rp. 37.500.000
6. Tanah Seluas 1.512 m2 di KAB / KOTA BANGGAI, HASIL SENDIRI Rp. 66.500.000
7. Tanah Seluas 1.280 m2 di KAB / KOTA BANGGAI, HASIL SENDIRI Rp. 62.500.000
8. Tanah Seluas 9.375 m2 di KAB / KOTA BANGGAI, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
9. Tanah Seluas 365 m2 di KAB / KOTA BANGGAI, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **42.500.000**

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 42.500.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	133.525.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	40.192.323
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.780.217.323
III. HUTANG	Rp.	83.219.082
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.696.998.241

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.